

RANCANGAN APBN TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK MEMPERCEPAT TRANSFORMASI EKONOMI

Hilma Meilani*

Abstrak

Berdasarkan Nota Keuangan dan RUU APBN Tahun Anggaran 2024, fokus utama RAPBN 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. RAPBN 2024 harus mampu merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan, dan mempercepat transformasi ekonomi. Tulisan ini menganalisis fokus kebijakan RAPBN 2024 untuk mempercepat transformasi ekonomi dan tantangan RAPBN 2024. Transformasi ekonomi dilakukan melalui strategi jangka pendek (mempercepat penghapusan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi); dan strategi jangka menengah (mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing; akselerasi pembangunan infrastruktur; pemantapan implementasi reformasi birokrasi; hilirisasi sumber daya alam; pengembangan ekonomi hijau). Pertumbuhan ekonomi 2024 diproyeksikan 5,2% dengan defisit anggaran 2,29% PDB. Tantangan besar yang dihadapi yaitu ketegangan geopolitik, disrupsi teknologi digital, dampak perubahan iklim dan dampak lanjutan pandemi Covid-19. DPR RI perlu memperhatikan agar kebijakan fiskal dilaksanakan pemerintah sesuai rencana, dan mengawal implementasi RAPBN 2024 agar target yang ditetapkan dapat tercapai.

Pendahuluan

Presiden RI Joko Widodo dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2023 menyatakan, APBN 2024 didesain

untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang, dan kebijakan APBN 2024 diarahkan untuk “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” (Investor Daily, 18 Agustus 2023).

Arsitektur APBN 2024 harus mampu merespon dinamika perekonomian, menjawab



* Analis Legislatif Ahli Muda, Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan (Ekkuinbang) Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI, e-mail: hilma.meilani@dpr.go.id.

tantangan dan mendukung agenda pembangunan, serta kesejahteraan secara optimal. Selain itu, APBN juga harus dapat mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, melindungi daya beli masyarakat dari guncangan, serta menjaga agar postur APBN tetap sehat dan berkelanjutan dalam jangka menengah-panjang.

Pada 5 Mei 2023 WHO mengumumkan berakhirnya status Covid-19 sebagai kejadian darurat kesehatan global dan pemerintah telah mencabut status pandemi Covid-19. Hal ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia agar perekonomian dapat kembali berjalan normal seperti sebelumnya (kemenkeu.go.id, 16 Agustus 2023). Tulisan ini menganalisis fokus kebijakan RAPBN 2024 untuk mempercepat transformasi ekonomi dan tantangan RAPBN 2024.

Fokus Utama RAPBN 2024

Arsitektur RAPBN 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar peran APBN dapat berfungsi optimal sebagai: (1) *shock absorber* untuk melindungi rakyat dan stabilisasi ekonomi dari guncangan global (stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, pengendalian inflasi); (2) akselerator transformasi ekonomi (*human capital, physical capital, natural capital* dan *institutional reform*); (3) instrumen mewujudkan kesejahteraan rakyat (penurunan kemiskinan ekstrem, *stunting*, kesenjangan).

Transformasi ekonomi dilakukan melalui dua strategi utama, jangka pendek dan jangka menengah. Jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan

kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi. Jangka menengah difokuskan pada lima agenda: (1) mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial; (2) akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi; (3) pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi; (4) meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, melalui hilirisasi sumber daya alam; (5) mendorong pengembangan ekonomi hijau (Bisnis Indonesia, 21 Agustus 2023). Strategi jangka pendek akan sulit untuk diwujudkan hanya dalam kurun waktu satu tahun mengingat tahun depan adalah tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo, sehingga strategi transformasi ekonomi harus diimbangi dengan upaya ekstra dari pemerintah. Pemerintah perlu mendorong belanja negara diarahkan pada belanja produktif, dan agar belanja yang dialokasikan bisa terserap dengan baik dan tepat sasaran.

Untuk mendukung efektivitas akselerasi transformasi ekonomi, perlu penguatan reformasi fiskal melalui: (1) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan; (2) konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*); (3) mendorong pembiayaan yang inovatif, *prudent*, dan berkelanjutan (Bisnis Indonesia, 21 Agustus 2023).

Postur APBN dari tahun 2021-2023 dan RAPBN 2024 selengkapnya tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Postur APBN 2021-2023 dan RAPBN 2024 (Triliun Rp)

Postur APBN	2021		2022		2023		2024
	APBN	LKPP	APBN	Outlook	APBN	Outlook	RAPBN
A PENDAPATAN NEGARA	1.743,6	1.735,7	1.846,1	2.436,9	2.463,0	2.637,2	2.781,3
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.742,7	1.733,0	1.845,6	2.435,9	2.462,6	2.634,1	2.780,9
1. Penerimaan Perpajakan	1.444,5	1.375,8	1.510,0	1.924,9	2.021,2	2.118,3	2.307,9
2. PNPB	298,2	357,2	335,6	510,9	441,4	515,8	473,0
II. PENERIMAAN HIBAH	0,9	2,7	0,6	1,0	0,4	3,1	0,4
B BELANJA NEGARA	2.750,0	2.697,2	2.714,2	3.169,1	3.061,2	3.123,7	3.304,1
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.954,5	1.927,0	1.944,5	2.370,0	2.246,5	2.298,2	2.446,5
1. Belanja K/L	1.032,0	1.059,4	945,8	1.032,5	1.000,8	1.085,5	1.077,2*
2. Belanja Non K/L	922,6	867,5	998,8	1.337,5	1.245,6	1.212,8	1.369,3
II. TRANSFER KE DAERAH	795,5	770,3	769,6	799,1	814,7	825,4	857,6
C KESEIMBANGAN PRIMER	(633,1)	(595,3)	(462,2)	(328,4)	(156,8)	(49,0)	25,5
D SURPLUS / ((DEFISIT) ANGGARAN	(1.006,4)	(961,5)	(868,0)	(732,2)	(598,2)	(486,4)	(522,8)
% Defisit Anggaran thd PDB	(5,70)	(5,82)	(4,85)	(3,92)	(2,84)	(2,30)	(2,29)
E PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.006,4	961,5	868,0	732,2	598,2	486,4	522,8

Sumber: Diolah dari Data APBN (kemenkeu.go.id)

*) Alokasi belanja K/L diperkirakan menjadi sebesar Rp1.086,6 triliun, jika menampung kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan tumbuh 5,1%, dan tahun 2024 diproyeksikan 5,2%, dengan defisit 2,29% PDB. Pertumbuhan ekonomi 2021 mencapai 3,7% dengan defisit 5,70% PDB dan di 2022 turun menjadi 3,92% PDB (kemenkeu.go.id, 16 Agustus 2023). Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UU, batas defisit anggaran direlaksasi di atas 3% dari PDB dalam tahun 2020-2022 untuk memberikan ruang fiskal tambahan bagi APBN dalam merespon kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pemerintah perlu terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam

mengantisipasi dan menyiapkan mitigasi menghadapi risiko dan tantangan perekonomian.

Tantangan RAPBN Tahun Anggaran 2024 dan Catatan DPR

Setidaknya terdapat empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian, yaitu: (1) ketegangan geopolitik; (2) perkembangan teknologi informasi yang cepat atau disrupsi teknologi digital; (3) dampak perubahan iklim; (4) dampak lanjutan pandemi Covid-19. Struktur perekonomian nasional dan tingkat produktivitas nasional perlu diperkokoh melalui pengoptimalan: (1) fungsi distribusi APBN, berupa penerapan kebijakan/program afirmasi seperti penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan *stunting*; (2) fungsi stabilisasi APBN sebagai *shock absorber*, yaitu kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat dan kebijakan penguatan daya saing investasi untuk membuka

peluang kesempatan kerja; (3) fungsi alokasi APBN, melalui penguatan reformasi struktural pada bidang-bidang prioritas pembangunan yang bersifat strategis (kemenkeu.go.id, 16 Agustus 2023).

Beberapa ekonom memandang target defisit anggaran Rp522,8 triliun atau 2,29% PDB kurang realistis, karena adanya lonjakan belanja secara signifikan. Belanja K/L ditetapkan Rp1.077,2 triliun, diestimasi menjadi Rp1.086,6 triliun jika menampung kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Pusat, TNI, dan Polri, dan belanja pada komponen lain mengingat tahun 2024 akan diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) (Bisnis Indonesia, 21 Agustus 2023). Target defisit anggaran RAPBN 2024 lebih rendah dari tahun 2023 (2,84%), namun pembiayaan defisit Rp522,8 triliun harus dikelola dengan hati-hati karena kondisi perekonomian global ke depan sulit untuk diprediksi.

Pemerintah memproyeksikan belanja perpajakan tahun 2024 sebesar Rp374,5 triliun atau tumbuh 6,15% dari proyeksi tahun 2023 (Rp352,8 triliun). Pengamat ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institution menilai insentif pajak harus diprioritaskan pada investasi baru atau ekspansi investasi terutama di sektor riil. Untuk konsumsi sumber daya alam dan pertanian, insentif bisa ditambah jika prioritas hilirisasi diarahkan untuk pasar ekspor. Pemerintah disarankan memberikan insentif pajak untuk pengurangan emisi karbon (Kontan, 22 Agustus 2023). Anggaran infrastruktur tahun 2024 senilai Rp422,7 triliun, merupakan alokasi anggaran terbesar untuk infrastruktur dalam 5 tahun terakhir. Alokasi anggaran infrastruktur juga diarahkan untuk mendukung pembangunan IKN di

Kalimantan Timur (Bisnis Indonesia, 21 Agustus 2023).

Beberapa catatan DPR RI terkait RAPBN Tahun Anggaran 2024 yakni: (1) Anggaran yang disiapkan Rp40 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sangat kontras dengan anggaran yang disediakan pemerintah untuk pembangunan dan pemerataan daerah lainnya. Diharapkan pembangunan IKN tidak dilakukan hanya untuk mengejar hal yang seremonial seperti upacara HUT Kemerdekaan 2024; (2) Terkait target inflasi 2,8%, kenaikan gaji ASN dapat berdampak pada laju inflasi sehingga pemerintah perlu mengantisipasi risiko deviasi pencapaian target inflasi (cnbcindonesia.com, 22 Agustus 2023).

Alokasi anggaran infrastruktur yang lebih banyak dialokasikan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional, termasuk proyek IKN perlu mendapat perhatian pemerintah, agar pembangunan infrastruktur tidak menjadi beban ekonomi namun harus dapat meningkatkan daya saing ekonomi. Selain itu, kebijakan hilirisasi SDA harus dapat membangkitkan industri nasional dan memberi nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Penutup

Tercapainya fokus utama RAPBN 2024 sangat bergantung pada kapasitas dan ketahanan postur RAPBN 2024 dengan memerhatikan risiko dan keberlanjutan fiskal, sehingga terwujud APBN yang sehat dan berkelanjutan. APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mendorong penurunan tingkat kemiskinan. Untuk mencapai hal tersebut, APBN memiliki fungsi distribusi yang terdiri dari kebijakan

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi yang adil terhadap kelompok miskin dan rentan, antara lain melalui program perlindungan sosial (perlinsos). Selain itu, kebijakan hilirisasi SDA diharapkan akan memberikan nilai tambah sehingga laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat dicapai.

DPR RI melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran perlu memerhatikan agar kebijakan fiskal tahun 2024 dapat dilaksanakan pemerintah sesuai rencana (RKP dan RKA-K/L). DPR RI juga perlu mengawal implementasi RAPBN Tahun Anggaran 2024 agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Diperlukan sinergi antara DPR RI dan pemerintah untuk optimalisasi APBN yang sehat dan berkelanjutan.

Referensi

- “APBN 2024 Fokus Wujudkan SDM Unggul”, *Investor Daily*, 18 Agustus 2023, hal. 7.
- “Arsitektur RAPBN 2024”, *Bisnis Indonesia*, 21 Agustus 2023, hal. 2.
- “Bersandar Pada Belanja Arsitektur”, *Bisnis Indonesia*, 21 Agustus 2023, hal. 4.

“Data APBN”, <https://data-apbn.kemenkeu.go.id/lang/id/>, diakses 18 Agustus 2023.

“Diwarnai Kritik DPR Tetap Setuju Lanjut Bahas RAPBN 2024”, 22 Agustus 2023, *cncindonesia.com*, <https://www.cncindonesia.com/news/20230822155926-4-465121/diwarnai-kritik-dpr-tetap-setuju-lanjut-bahas-rapbn-2024>, diakses 22 Agustus 2023.

“Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024”, *kemenkeu.go.id*, <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/>, diakses 16 Agustus 2023.

“Pemerintah Tebar Insentif Pajak Rp374,5 Triliun”, *Kontan*, 22 Agustus 2023, hal. 1.

“Target Defisit Over Optimistis”, *Bisnis Indonesia*, 21 Agustus 2023, hal. 11.